

MENJEBATANI PARTISIPASI: PENGELOLAAN PROGRAM PARTISIPATIF BERBASIS PERILAKU PADA PEMERINTAH DAERAH DI PROVINSI LAMPUNG

Dedy Hermawan^{1,2}, Simon Sumanjoyo Hutagalung²

¹Jurusan Administrasi Negara FISIP Universitas Lampung

²Jurusan Administrasi Negara FISIP Universitas Lampung

¹Email: dedy.hermawan@fisip.unila.ac.id, ²Email: simon.sumanjoyo@fisip.unila.ac.id,

Abstrak

Partisipasi adalah pendekatan yang menjadi tren dalam desain program pemerintah yang terkait dengan kesejahteraan sosial. Melalui partisipasi dampak pemberdayaan masyarakat diharapkan dapat muncul di samping pencapaian keluaran program. Penelitian ini bertujuan untuk menguji model partisipasi masyarakat berbasis perilaku. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan penelitian eksperimen yang dilakukan dengan menggunakan model Pretest-Posttest Control Group Design dengan satu macam perlakuan pada satu kelompok eksperimen dan satu kelompok pembandingan.

Hasil penelitian ini menyimpulkan pemberian perlakuan pada kelompok eksperimen memberikan peningkatan yang lebih tinggi daripada kelompok control, artinya model partisipasi berbasis perilaku dapat diterima dan merubah pengetahuan kelompok sasaran. Selain kemampuan personal menguat dengan model berbasis penguatan inisiatif partisipasi ini, masyarakat memiliki kemampuan social kelompok yang menguat yaitu: menghargai orang lain, mampu bekerja sama dengan orang lain, mandiri, memiliki kemampuan tampil di depan umum (public speaking), peduli dengan sesama, dan memiliki kemelekan terhadap informasi kelompok.

Kata Kunci: Partisipasi Masyarakat, Program Pemerintah, Perilaku Komunitas

Abstract

Participation is the approach that has become a trend in the design of government programs related to social welfare. Through different events. This study aims to examine the behavior-based community interaction model. The type of research used in this study is quantitative research using experimental research conducted using the Pretest-Posttest Design Group Control model with one kind of observation in one experimental group and one comparison group.

The results of this study were conducted in the experimental group which gave a higher speed than the control group, including the model used to find and change the knowledge of the target group. In addition to strengthening personal abilities with community-based models, the community has the ability to strengthen social groups: others, are able to work with others, are independent, have the ability to appear in public (public speaking), care for others, and have an attitude towards group information.

Keyword: Community Participation, Government Programs, Community Behavioral

PENDAHULUAN

Dalam mewujudkan pemerintahan di daerah khususnya pelaksanaan suatu kebijakan, partisipasi masyarakat daerah yang dilakukan atas kemauan sendiri lebih dibutuhkan daripada partisipasi masyarakat yang dipaksakan, karena hal ini merupakan awal kemandirian dan pengembangan kompetensi dalam pemerintahan. Partisipasi yang didorong oleh pemerintah juga menandakan tidak adanya dominasi ataupun hegemoni dalam pemerintahan tersebut (Kleden, 2004).

Pemerintahan tidaklah terlaksana dengan efektif jika tidak didukung oleh masyarakat yang memiliki berbagai latar belakang sosial, pendidikan, ekonomi, budaya, dan rasa kesadaran yang memberi pengaruh pada perkembangan pemerintahan (Mansuri & Rao, 2012). Dalam konteks partisipasi, masyarakat sebagai individu berkinerja secara optimal guna mendukung kebijakan pemerintah. Secara kolektif, masyarakat bekerja secara bersama mendorong pencapaian kebijakan pemerintah agar mencapai hasil yang optimal. Secara individu dan kolektif saling memiliki keterkaitan dalam konteks partisipasi (Pelencia, Bassile, & Ceruti, 2015).

Pemerintah mendorong pembangunan di daerah melalui beberapa program yang mengandung muatan partisipasi. Namun demikian, wujud berbeda ditemukan dalam implementasi kebijakan dan program di beberapa sektor, dalam sector pendidikan misalnya partisipasi muncul dalam wujud pemilihan anggota komite sekolah, perencanaan bersama antara komite sekolah dan pihak sekolah (Menno, et al., 2014). Dalam pengelolaan sampah partisipasi berwujud kesadaran kolektif untuk memilah sampah, mendaur ulang dan merubah sampah menjadi kompos (Dhokhikah, Trihadiningrum, & Sunaryo, 2015), pengentasan kemiskinan (Apriyanti, 2011) dan pengelolaan hutan (Alfitri, 2005). Partisipasi yang bersifat terencana dan teorganisir juga muncul dalam program-program pembangunan infrastruktur di pedesaan dan perkotaan.

Berbagai program partisipasi tersebut menunjukkan gejala yang berbeda, termasuk memunculkan partisipasi semu, partisipasi administratif atau bahkan gagal mengadakan partisipasi (Muslim, 2017). Hal itu sekaligus mengindikasikan terjadinya perbedaan antara partisipasi organik (usaha endogen oleh aktivis masyarakat untuk menghasilkan perubahan) dan partisipasi yang diinduksi (upaya berskala besar untuk merancang partisipasi di tingkat lokal melalui program dan proyek) (Mansuri & Rao, 2012). Dalam konteks lain, partisipasi yang terjadi juga nampak masih belum mampu menguatkan relasi antara agensi kolektif dan kapabilitas kolektif yang menggerakkan kelompok sasaran program untuk melaksanakan proses partisipasi (Pelencia, Bassile, & Ceruti, 2015).

Dalam aspek relasi tersebut, maka partisipasi yang terjadi dalam lingkup lokal menarik untuk dikaji. Jika partisipasi mencakup pelibatan personal dan kelompok, mengapa partisipasi dalam program pemerintah senantiasa menghadapi kondisi tidak optimalnya capaian partisipasi yang dikehendaki. Dengan berusaha membatasi wilayah penelitian pada pemerintah daerah di Provinsi Lampung maka pada riset sebelumnya telah diidentifikasi model partisipasi masyarakat berbasis perilaku. Model pengelolaan partisipasi berbasis perilaku dibangun dengan mengadopsi konsep *community engagement* dan *personal engagement*.

Pada dimensi individu, bangunan model partisipasi berbasis perilaku masyarakat terkait dengan konsepsi *personal resources* yang merupakan prediktor *work engagement*. Kata kunci dalam uraian tersebut adalah perlunya penguatan *self efficacy* dalam desain program partisipasi. Proses perilaku dalam *self-efficacy* yang turut berperan dalam diri manusia ada empat, yakni proses kognitif, motivasional, afeksi, dan proses pemilihan/seleksi. Keempat proses inilah yang kemudian perlu diakomodasi dalam desain program yang berbasis partisipasi masyarakat. Pada

dimensi komunitas, pendekatan *community engagement* adalah serangkaian langkah untuk melibatkan masyarakat secara aktif dalam menangani masalah, seperti membentuk koalisi, atau memfasilitasi lokakarya masyarakat. Dalam aspek *community engagement* pada desain program partisipasi, terdapat beberapa poin utama untuk memastikan keberhasilan penerapan model, yaitu; fasilitator, relasi organisasi, pengaturan tugas, pelatihan, tenaga pendukung, dana, dan kelompok pengarah.

Dengan demikian ada beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu: (1).Apakah model partisipasi berbasis perilaku dapat merubah pengetahuan dan motivasi para kelompok sasaran program partisipatif?. (2). (1).Apakah model partisipasi berbasis perilaku berpengaruh terhadap pengetahuan dan motivasi para kelompok sasaran program partisipatif??. dan (3). Apa saja perubahan pengetahuan dan motivasi para kelompok sasaran program partisipatif terkait model partisipasi berbasis perilaku?.

TINJAUAN PUSTAKA

Partisipasi merupakan salah satu fundamen pokok dalam sistem yang demokratis. J.S. Mill pada 1861 telah mengemukakan partisipasi sebagai pembuktian bagi pemerintah untuk memuaskan seluruh komponen negara dimana seluruh rakyat dapat ikut serta; bahwa partisipasi, bahkan dalam fungsi pengelolaan publik yang paling terkecil, menjadi berguna; bahwa partisipasi seharusnya terdapat dimanapun sebagai kesepakatan umum dalam upaya pengembangan komunitas yang hendak dilakukan (Arblaster, 1987: 63, Bochel, 2006: 11).

Partisipasi sebagai sebuah prasyarat masyarakat yang demokratis merupakan sebuah premis, bahwa agar masyarakat menjadi demokratis, maka harus terdiri dari institusi yang benar-benar partisipatif (Foltz, 1999). Penggunaan kewenangan dan kekuasaan untuk mengendalikan keputusan teknis menunjukkan lingkup dimana publik dikeluarkan dari pergerakan yang dapat mempengaruhi nasib masyarakat. Masyarakat perlu untuk mempengaruhi pengambilan keputusan dalam institusi tersebut dalam cara yang substantif. Karenanya, meningkatkan level partisipasi dapat membuat institusi tersebut lebih baik (Foltz, 1999).

Sementara itu, Pretty (1995) dalam (Syahri, 2016) mengutarakan bahwa sesungguhnya ada tujuh karakteristik tipologi partisipasi, yang berturut-turut semakin dekat kepada bentuk yang ideal. yaitu: (1). Partisipasi pasif atau manipulatif. Karakteristiknya adalah masyarakat menerima pemberitahuan apa yang sedang dan telah terjadi. Pengumuman sepihak oleh pelaksana proyek tidak memperhatikan tanggapan masyarakat sebagai sasaran program (Gustavsson, Lindström, Jiddawi, & De La Torre-Castro, 2016). (2). Partisipasi informatif. Masyarakat menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian untuk proyek, namun tidak berkesempatan untuk terlibat dan mempengaruhi proses penelitian (Ford & King, 2015). Akurasi hasil penelitian, tidak dibahas bersama masyarakat. (3). Partisipasi konsultatif. Masyarakat berpartisipasi dengan cara berkonsultasi, sedangkan orang luar mendengarkan, menganalisa masalah dan pemecahannya. Belum ada peluang untuk pembuatan keputusan bersama (Ford & King, 2015). (4). Partisipasi insentif. Masyarakat memberikan korbanan dan jasa untuk memperoleh imbalan insentif berupa upah, walau tidak dilibatkan dalam proses pembelajaran atau eksperimen-eksperimen yang dilakukan (Adhikari, Kingi, & Ganesh, 2014). (5). Partisipasi fungsional. Masyarakat membentuk kelompok sebagai bagian proyek, setelah ada keputusan-keputusan utama yang disepakati. Pada tahap awal, masyarakat tergantung kepada pihak luar, tetapi secara bertahap menunjukkan kemandiriannya (DiPaola & Tschannen-Moran, 2014). (6). Partisipasi interaktif. Masyarakat berperan dalam analisis untuk perencanaan kegiatan dan pembentukan atau penguatan kelembagaan. Masyarakat memiliki peran untuk mengontrol atas pelaksanaan keputusan-keputusan mereka, sehingga memiliki andil dalam keseluruhan proses kegiatan (Conole, 2015). (7). Mandiri (*self mobilization*). Masyarakat mengambil inisiatif sendiri secara bebas (tidak dipengaruhi oleh pihak luar) untuk merubah sistem atau nilai-nilai yang mereka junjung. Masyarakat memegang kendali atas pemanfaatan sumberdaya yang ada dan atau digunakan (Lilleker & Koc-Michalska, 2017).

Partisipasi masyarakat sangat diperlukan sebagai syarat utama dalam pelaksanaan pembangunan dengan sistem swadaya, partisipasi turut mendorong dan memperlancar proses pembangunan. Dalam kaitannya partisipasi dalam pembangunan menurut Slamet (1980) dalam (Panggabean, 2013) mendefinisikan sebagai ikut sertanya masyarakat dalam memberikan masukan dalam pembangunan, yang dapat berupa bantuan tenaga, materi, dana, keahlian, gagasan, alternatif dan kepuasan, dan ikut menikmati hasil pembangunan seperti yang dimaksud oleh tujuan pembangunan itu.

Sedangkan menurut Madrie (1988), partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah keikutsertaan warga atau keterlibatan warga masyarakat dalam proses pembangunan, ikut memanfaatkan hasil pembangunan, ikut mendapat keuntungan dan proses dan hasil pembangunan baik pembangunan yang dilakukan oleh komunitas, organisasi atau pembangunan yang dilakanakan oleh pemerintah (Irwan Effendi, 2012:8). Dari definisi di atas dapat dinyatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah masyarakat ikut serta dalam pembangunan guna meningkatkan, memperlancar, dan menjamin berhasilnya usaha pembangunan, masyarakat diharapkan untuk ikut serta karena hasil pembangunan yang dirancang dan diselenggarakan dirnaksudkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat itu sendiri, partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah keikutsertaan masyarakat secara aktif dalam rangka kegiatan yang konstruktif untuk mencapai suatu keadaan yang lebih baik.

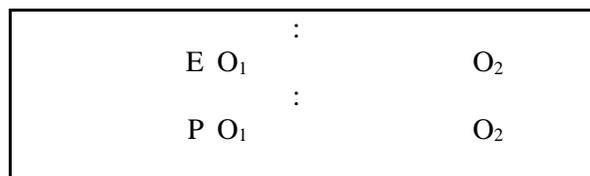
Perilaku dalam kegiatan partisipasi pada dasarnya berorientasi pada tujuan. Dengan perkataan lain, perilaku kita pada umumnya dimotivasi oleh suatu keinginan untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan spesifik tersebut tidak selalu diketahui secara sadar oleh individu yang bersangkutan (Winardi, 2004). Berikut merupakan definisi perilaku sebagai hasil dari konstruksi teori-teori dan riset, sebagai berikut:

- a. Perilaku merupakan sesuatu yang disebabkan karena sesuatu hal
- b. Perilaku ditunjukan ke arah sasaran tertentu
- c. Perilaku yang dapat diobservasi dapat diukur
- d. Perilaku yang tidak langsung dapat di observasi (contoh berpikir, melaksanakan persepsi) juga penting dalam rangka mencapai tujuan-tujuan
- e. Perilaku dimotivasi

Skinner (1938) dalam (Muller, 2015) merumuskan bahwa perilaku merupakan respons atau reaksi seseorang terhadap stimulus (rangsangan dari luar), oleh karena perilaku itu terjadi melalui proses adanya stimulus terhadap organisme dan kemudian organisme tersebut merespons. Respons dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: (a). respondent respons atau reflexive, yaitu respons yang timbulkan oleh rangsangan-rangsangan (stimulus) tertentu. Misalnya cahaya terang menyebabkan mata tertutup. Respons ini mencakup perilaku emosional, misalnya mendengar berita musibah menjadi sedih, dan (b). operant respons atau instrumental respons, yaitu respons yang timbul dan berkembang kemudian diikuti oleh stimulus atau perangsang tertentu. Perilaku tersebut akan mendorong terjadinya partisipasi dalam tingkatan yang berbeda.

Metode

Pada penelitian ini akan dilakukan penelitian eksperimen untuk menguji efektivitas model partisipasi masyarakat berbasis perilaku yang telah dihasilkan pada tahap sebelumnya (tahap 5) terhadap peningkatan pandangan dan inisiatif masyarakat. Variable bebasnya adalah model partisipasi masyarakat berbasis perilaku, sedangkan 2 (dua) variable terikatnya adalah pandangan dan inisiatif masyarakat. Variabel pandangan/wawasan akan diukur lewat test yang akan diberikan kepada masyarakat peserta eksperimen di awal dan akhir tindakan (*pretest* dan *posttest*). Sedangkan variabel inisiatif akan dilihat dengan menggunakan instrumen persepsional. Penelitian eksperimen ini akan dilakukan dengan menggunakan model *Pretest-Posttest Control Group Design* dengan satu macam perlakuan (Arikunto, 2003), yang dilakukan pada satu kelompok eksperimen dan satu kelompok pembanding. Model eksperimen dilakukan seperti yang digambarkan pada gambar berikut.



Gambar 1. Pretest-Posttest Control Group Design

E= Kelompok Eksperimen
P = Kelompok pembanding
O₁ = Pretest
O₂ = Posttest

Ho : Penggunaan model partisipasi masyarakat berbasis perilaku tidak meningkatkan pandangan/wawasan masyarakat.

Ho : Penggunaan model partisipasi masyarakat berbasis perilaku tidak meningkatkan inisiatif masyarakat.

Ho : Penggunaan model partisipasi masyarakat berbasis perilaku tidak meningkatkan pandangan dan inisiatif masyarakat.

Pada tahap analisis akan dilakukan tinjauan terhadap model partisipasi masyarakat berbasis perilaku dengan memperhatikan hasil ujicoba. Selanjutnya apabila terbukti bahwa model partisipasi masyarakat berbasis perilaku dapat meningkatkan baik wawasan maupun inisiatif masyarakat dalam proses pembelajaran, maka model tersebut akan dibakukan untuk dijadikan sebagai model partisipasi masyarakat berbasis perilaku dalam program partisipasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Uji Coba Model Partisipasi Masyarakat Berbasis Perilaku

Model yang telah dirancang di tahun pertama diujikan di dua kelompok yang berbeda. Kelompok eksperimen diberi perlakuan dengan menerapkan model partisipasi masyarakat berbasis perilaku, sedangkan kelompok pembanding diberi perlakuan dengan model partisipasi masyarakat konvensional tanpa menambahkan aktivitas untuk meningkatkan inisiatif masyarakat. Hasil dari uji coba ini dapat dilihat di bawah ini:

Tabel. Paired Samples Statistics

	Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
eksp_1	67.5200	25	12.46368	2.49274
Pair 1				
Eksp_2	77.9600	25	6.94310	1.38862
kon_1	65.6800	25	11.63228	2.32646
Pair 2				

kon_2	69.720025	8.83893	1.76779
-------	-----------	---------	---------

Tabel di atas dapat dikatakan bahwa:

Pair 1: Perbandingan mean nilai pretes dan postes kelompok eksperimen

Mean Pasangan eksp_1- eksp_2 terlihat mean pretes sebesar 67,5200 dan postes sebesar 77,9600 dari jumlah subyek (N) sebanyak 25

Pair 2: Perbandingan mean nilai pretes dan postes kelompok kontrol

Mean Pasangan kon_1-kon_2 terlihat mean pretes sebesar 65,6800 dan postes sebesar 69,7200 dari jumlah subyek (N) sebanyak 2

Tabel. Paired Samples Correlations

	N	Correlation	Sig.
Pair 1 eksp_1 & eksp_2	25	.763	.000
Pair 2 kon_1 & kon_2	25	.821	.000

Tabel korelasi menunjukkan pada pair 1 (eksp_1 & eks_2) menunjukkan angka korelasi sebesar 0,763 dengan tingkat signifikan 0,0 berarti hasil pre dan postes memang nyata dan kuat/erat. Pair 2 (kon_1 & kon_2) menunjukkan angka korelasi sebesar 0,821 dengan tingkat signifikan 0,0 berarti hasil pre dan postes nyata dan kuat/erat. Tingkat keeratannya lebih tinggi dari kelompok eksperimen.

Tabel. Paired Samples Test

	Paired Differences			
	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference
				Lower
Pair 1 eksp_1 - eksp_2	-10.44000	8.45123	1.69025	-13.92850
Pair 2 kon_1 - kon_2	-4.04000	6.68007	1.33601	-6.79740

Tabel. Paired Samples Test

	Paired Differences		t	df	Sig. (2-tailed)
	95% Confidence Interval of the Difference				
	Upper				
Pair 1 eksp_1 - eksp_2	-6.95150		-6.177	24	.000
Pair 2 kon_1 - kon_2	-1.28260		-3.024	24	.006

Dari kedua kelompok ternyata tingkat signifikan adalah di bawah 0,05 sehingga dasar pengambilan kesimpulannya adalah sebagai berikut: Dasar pengambilan keputusan :

H_0 : Rata-rata nilai pretes dan postes adalah identik.

H_1 : Rata-rata nilai pretes dan postes adalah tidak identik.

Jika probabilitas > 0.05 , H_0 diterima, tetapi jika prob < 0.05 , H_0 ditolak

Dari output dapat kita lihat bahwa Sig (2 tailed) = 0.000. Hal itu berarti bahwa probabilitas kurang dari 0.05 yang berarti juga bahwa H_0 ditolak yang berarti pemberian perlakuan pada kelompok eksperimen adalah tidak identik. Atau dengan kata lain pemberian perlakuan pada kelompok eksperimen ternyata cukup efektif untuk meningkatkan prestasi belajar subyek.

Di sisi lain kelompok kontrol juga menunjukkan hal yang sama dalam hal signifikan dengan nilai 0,006 yang nilainya masih di bawah 0,05. Seperti halnya kelompok eksperimen ternyata peningkatan rerata nilai pretes dan postes pada kelompok kontrol juga signifikan.

Dari hasil yang diperoleh dari perbandingan mean pretes dan postes pada kelompok eksperimen dan kontrol walaupun terlihat dengan penggunaan perlakuan dan tanpa perlakuan menunjukkan sama-sama signifikan/ efektif dalam peningkatan rerata nilai pada kedua kelompok tersebut, akan tetapi bisa dilihat dari perbandingan rerata mean pada kelompok eksperimen terjadi peningkatan rerata yang lebih tinggi yaitu dengan kenaikan rata-rata sebesar 10,44 dibanding peningkatan hanya sebesar 4,04 pada rerata nilai kelompok kontrol. Ini bisa dikatakan bahwa pemberian perlakuan pada kelompok eksperimen memberikan peningkatan yang lebih tinggi daripada kelompok kontrol.

Dengan mengujicobakan model partisipasi masyarakat berbasis perilaku di kelompok eksperimen hasil juga menunjukkan bahwa masyarakat di kelompok eksperimen memiliki *soft skills* yang meningkat dibanding dengan masyarakat di kelompok kontrol. Kemampuan *soft skills* yang dimiliki masyarakat dapat dilihat pada sub bab berikut ini.

2. Hasil Observasi Karakter (*soft skills*) Masyarakat

Setelah model partisipasi berbasis perilaku tersebut diujicobakan secara terbatas, selain kemampuan *hard skills*, masyarakat memiliki kemampuan *soft skills* sebagai berikut:

1. Berani mengemukakan gagasan, ide dan pandangan partisipatifnya.

Kemampuan *soft skill* masyarakat dalam hal mengemukakan pendapat dapat dilihat pada tahap ke satu. Pada tahap ini masyarakat harus berani mengemukakan pendapatnya sebagai bentuk inisiatif dan ketertarikannya terhadap potensi partisipasi mereka.

2. Mampu bekerja sama dengan orang lain

Kemampuan bekerja sama ini akan terlihat ketika masyarakat diminta untuk bekerja dalam kelompok yang harus mempersiapkan program partisipatif.

3. Menghargai pendapat orang lain

Dalam diskusi kelompok ini, penguatan inisiatif partisipasi yang diberikan ke masyarakat adalah bagaimana menghargai pendapat orang lain baik pada kelompoknya sendiri maupun menghargai pendapat orang lain ketika perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan program partisipasi.

4. Mandiri

Kemandirian masyarakat bisa dilihat ketika mereka merumuskan keterlibatan individu. Mereka harus mampu merumuskan gagasan atau inisiatif keterlibatannya. Mereka harus menyatakan komitmennya dan bersedia untuk konsisten dalam pelaksanaan program tersebut.

5. Peduli terhadap orang lain

Kepedulian individu terhadap orang lain dapat dilihat dari kegiatan masyarakat ketika mereka melakukan perencanaan dan pelaksanaan program di luar kelompok. Kepedulian ini tercermin dari cara masyarakat memperhatikan beberapa masyarakat yang dianggap kurang mampu berpartisipasi dan membantu mereka untuk terlibat.

6. Memiliki kemampuan menyampaikan aspirasi di rapat program

Kemampuan ini dapat dilihat dari kegiatan masyarakat ketika mereka berdiskusi merencanakan suatu program. Ketika mereka mempresentasikan gagasannya mereka harus berbicara dengan pemikiran dan empati yang baik agar dapat diterima oleh peserta dengan jelas.

Kesimpulan

Dari analisis pada bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa dari hasil yang diperoleh dari perbandingan mean pretes dan postes pada kelompok eksperimen dan kontrol walaupun terlihat dengan penggunaan perlakuan dan tanpa perlakuan menunjukkan sama-sama signifikan/ efektif dalam peningkatan rerata nilai pada kedua kelompok tersebut, akan tetapi bisa dilihat dari perbandingan rerata mean pada kelompok eksperimen terjadi peningkatan rerata yang lebih tinggi yaitu dengan kenaikan rata-rata sebesar 10,44 dibanding peningkatan hanya sebesar 4,04 pada rerata nilai kelompok kontrol. Ini bisa dikatakan bahwa pemberian perlakuan pada kelompok eksperimen memberikan peningkatan yang lebih tinggi daripada kelompok kontrol.

Selain kemampuan personal menguat dengan model berbasis penguatan inisiatif partisipasi ini, masyarakat memiliki kemampuan social kelompok yang menguat yaitu: menghargai orang lain, mampu bekerja sama dengan orang lain, mandiri, memiliki kemampuan tampil di depan umum (public speaking), peduli dengan sesama, dan memiliki kemelekkan terhadap informasi kelompok.

Saran

Karena model ini sangat penting di dalam meningkatkan partisipasi Masyarakat, maka sebaiknya para pengelola program menerapkan model ini di dalam penyusunan program partisipasinya. Selain itu, para pimpinan atau pengelola instansi pemerintah daerah sebaiknya mendukung model ini agar bisa diterapkan.

REFERENSI

- Adhikari, S., Kingi, T., & Ganesh, S. (2014). Incentives for community participation in the governance and management of common property resources: the case of community forest management in Nepal. *Forest Policy and Economics*, 1-9.
- Alfitri. (2005). Model Perhutanan Sosial Berbasis Partisipasi Masyarakat Pada Program Konservasi Hutan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS). *Indonesian Journal For Sustainable Future*, 29-42.
- Apriyanti. (2011). *ANALISIS PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN KOTA SEMARANG (Kasus Implementasi Program Pinjaman Bergulir PNPM Mandiri Perkotaan Kelurahan Kemijen Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Tahun 2008-2010)*. Semarang: Undip.
- Arblaster, A. (1987). *Democracy (Concept in a Social Science)*. Bristol: Open University Press.
- Bochel, C. (2006). New Labour, Participation and the Policy Process . *Public Policy and Administration*, 10-22.
- Conole, G. G. (2015). MOOCs as disruptive technologies: strategies for enhancing the learner experience and quality of MOOCs. *Revista de Educación a Distancia*, 39.
- Dhokhikah, Y., Trihadiningrum, Y., & Sunaryo, S. (2015). Community participation in household solid waste reduction in Surabaya, Indonesia. *Resources, Conservation and Recycling*, 153-162.

- DiPaola, M., & Tschannen-Moran, M. (2014). Organizational citizenship behavior in schools and its relationship to school climate. *Journal of School Leadership*, 424-447.
- Ford, J. D., & King, D. (2015). A framework for examining adaptation readiness. . *Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change*, 505-526.
- Franz, F. (1999). Five Arguments for Increasing Public Participation in Making Science Policy . *Buletin of Science, Technology and Society*, 117-127.
- Gustavsson, M., Lindström, L., Jiddawi, N. S., & De La Torre-Castro, M. (2016). Procedural and distributive justice in a community-based managed Marine Protected Area in Zanzibar, Tanzania. *Marine Policy*, 91-100.
- Kleden, I. (2004). *Masyarakat dan negara: sebuah persoalan*. Jakarta: Penerbit Agromedia Pustaka.
- Lilleker, D. G., & Koc-Michalska, K. (2017). What drives political participation? Motivations and mobilization in a digital age. *Political Communication*, 21-43.
- Mansuri, G., & Rao, V. (2012). *Localizing Development: Does Participation Work?* Washington: World Bank Publications.
- Menno, P., Suryadarma, D., Beatty, A., Wong, M., Gaduh, A., Alisjahbana, A., & Artha, R. P. (2014). Improving Educational Quality through Enhancing Community Participation: Results from a Randomized Field Experiment in Indonesia. *American Economic Journal: Applied Economics*, 105-126.
- Muller, E. N. (2015). *Aggressive Political Participation*. Princeton: Princeton University Press.
- Muslim, A. (2017). Analisis Kegagalan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat dalam Membangun Kemandirian Masyarakat Miskin (Studi Kasus di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur). *Jurnal Penyuluhan*, 79-87.
- Panggabean, R. (2013). PENYULUHAN PERKOPERASIAN DAN UKM. *INFOKOP*, 120-129.
- Pelenc, J., Bassile, D., & Ceruti, C. (2015). Collective capability and collective agency for sustainability: A case study. *Ecological Economics*, 226-239.
- Syahri, M. (2016). BENTUK – BENTUK PARTISIPASI WARGA NEGARA DALAM PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP BERDASARKAN KONSEP GREEN MORAL DI KABUPATEN BLITAR. *Jurnal Penelitian Pendidikan*, 109-136.
- Winardi, J. (2004). *Manajemen perilaku organisasi*. Jakarta: Prenada Media.



**SEMINAR NASIONAL PENGEMBANGAN TEKNOLOGI
PERTANIAN V
POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG**

Jalan Soekarno-Hatta No. 10 Rajabasa Bandar Lampung Telp. 703995

Nomor : 017/SEMTEK-XI/2018 Bandar Lampung, 17 September 2018
Lampiran : -
Perihal : Letter of Acceptance

Yth.
Di Tempat

Dengan hormat,
Sesuai dengan hasil pleno *Reviewer Seminar Nasional Pengembangan Teknologi Pertanian V (Semnas TEKTAN V)* bersama ini kami sampaikan bahwa artikel :

ID Artikel : SEMTEK/SOS003
Judul : Menjembatani Partisipasi: Pengelolaan Program Partisipatif Berdasarkan Perilaku Di Pemerintah Daerah Di Provinsi Lampung
Penulis : Dedy Hermawan dan Simon Sumanjoyo Hutagalung
Diterima : 10 September 2018

Dinyatakan disetujui untuk dipresentasikan dalam **Seminar Nasional TEKTAN V**

Bersama surat ini kami mengundang Bapak/Ibu untuk mempresentasikan artikel yang didaftarkan pada :

Hari/Tanggal : Kamis / 11 Oktober 2018
Tempat : Hotel Bukit Randu
Jl. Kamboja No. 1-2A, Kebon Jeruk Tanjung Karang, Bandar Lampung
Waktu : 08:00 sd Selesai

Demikian surat ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

KETUA PANITIA
SEMNAS TEKTAN V
POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG



Agung Adi Chandra, S.Kh. M.Si.
NIP 198110212003121002



SEMNAS

TEKTAN VII 2018



SERTIFIKAT

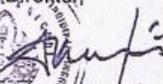
5180/PL.15/KP/2018

diberikan kepada :

Dr. Dedy Hermawan, M.Si

Atas partisipasi aktifnya sebagai **PEMAKALAH**

Pada Seminar Nasional Teknologi Pertanian VII Politeknik Negeri Lampung dengan tema
"Peran Penelitian Pertanian untuk Mendukung Pengembangan Teknologi Pertanian
Berbasis Sumberdaya Lokal dan Pemberdayaan Masyarakat"
yang dilaksanakan pada tanggal 11 Oktober 2018 di Hotel Bukit Randu Bandar Lampung

Direktur,

Dr. Ir. Saroni, M.Si
NIP. 196811131992031002